



## PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR : W17-U/ 546 /SK/KP.04.5/2/2019

#### T E N T A N G

### PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

#### KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Pontianak, diperlukan dukungan dari segenap jajaran pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Pontianak;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
6. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI**

**BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.**

- Pertama : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana Struktur Organisasi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas :
- Melaksanakan proses dan tahapan-tahapan program/kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Umum;
  - Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK  
PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



**H. AMIRYAT, S.H., M.H.**  
NIP. 195502221983031002



**SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

**PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM**  
H. AMIRYAT, S.H.,M.H.

**KOORDINATOR TEKNIKAL ZONA  
INTEGRITAS MENUJU  
WBK/WBBM**  
M. A. MUJAHID, S.H.,M.H.

**KETUA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM**  
Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H.

**KOORDINATOR OPERASIONAL  
ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WBK/WBBM**  
Drs. TAJUDIN NUR, S.H.

**KOORDINATOR AREA I  
MANAJEMEN  
PERUBAHAN**  
BINTORO WIDODO, S.H.

**KOORDINATOR AREA II  
PENATAAN TATA LAKSANA**  
H. SUNARYO WIRYO, S.H.

**KOORDINATOR AREA III  
PENATAAN SISTEM  
MANAJEMEN SDM**  
FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

**KOORDINATOR AREA IV  
PENGUATAN  
AKUNTABILITAS KINERJA**  
H. SUDARWIN, S.H.,M.H.

**KOORDINATOR AREA V  
PENGUATAN PENGAWASAN**  
HENDRA SITUMORANG, S.H.

**KOORDINATOR AREA VI  
PENINGKATAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK**  
H. YULMAN, S.H.,M.H.

**ANGGOTA AREA I**  
1. SYAMSUL QAMAR,  
S.H.,M.H.  
2. JHON HALASAN  
BUTAR BUTAR,  
S.H.,M.Si.,M.H.  
3. NURPIAH, S.Sos.  
4. SUBARI, S.H.  
5. ST. NINA MAULLA, S.T.  
6. SANRIYO P. MANALLU,  
S.E.

**ANGGOTA AREA II**  
1. RONIUS, S.H.  
2. DONNA H. SIMAMORA,  
S.H.  
3. SAWARDI, S.H.,M.H.  
4. ZULNIDA, S.T.  
5. RIKA PUTRI ANDRIANI,  
A.Md.  
6. ANDRY MAHBUB, S.E.

**ANGGOTA AREA III**  
1. HARTOMO, S.H.  
2. TINUK KUSHARTATI, S.H.  
3. RAHANIA, S.Kom.  
4. FADYAH, S.E.  
5. HAIFA, S.E.  
6. ENI IARIATI, A.Md.

**ANGGOTA AREA IV**  
1. BARITA SARAGIH,  
S.H.,LLM  
2. ANDI SURYA NUSA,  
S.H.,M.Si.  
3. FRANK PESSY,  
S.H.,M.H.  
4. SAMZA JANUARDI, S.T.  
5. ZULKARNAIN, S.Kom.  
6. EKA FITRIYANI, S.E.

**ANGGOTA AREA V**  
1. ERRY MUSTANTO,  
S.H.,M.Hum.  
2. APRIANTI, S.H.  
3. MARDANIS, S.H.  
4. DIAMIATUL ICHWAN, S.H.  
5. MAYSAROH, S.H.  
6. DWI WAHYU PRASETYO,  
S.Kom

**ANGGOTA AREA VI**  
1. ABSORO, S.H.  
2. NETTA  
KUSUMAHATY,  
S.H.,M.H.  
3. TULUS SUWARSO, S.H.  
4. KASDIN NAPTUPULU  
5. SISKA, S.E.  
6. TEOPILUS HERI  
SASWARL, S.E.,M.Ak.

DITETAPKAN DI PONTIANAK  
PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2019  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,

  
H. AMIRYAT, S.H.,M.H.  
NIP. 195502221983031002

